

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adiwinarto, S., 2024, *Reformulasi Pengaturan Obligasi Daerah di Era Otonomi Daerah*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.

Christiawan, R., 2020, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali Pers, Depok.

Hikmah, M., 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Refika Aditama, Bandung.

I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Jonaedi Efendi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, KENCANA, Jakarta.

Kristiawanto, 2024, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Nasmedia, Klaten.

Mahkamah Agung RI, 1999, *Pedoman Pelaksanaan Adminidtrasi Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Niaga*.

Marzuki, P. M., 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta.

Mutawalli, M., 2023, *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi(Konsep Teori dan Perkembangannya)*, Pustaka Aksara, Surabaya.

Nugroho, S. A., 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Solikin, N., 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Susanti, D. I., 2019, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo

Jurnal

Fatah, M., A., G., (2024). Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. *Jurnal Transparasi Hukum*. 7(1).

Ias, M., (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. 8(1).

Kasih, N., M., (2023). Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pubmedia: Social Sciences and Humanities*. 1(1).

M., Syahril, R., (2024). Tinjauan Hukum Moratorium Permohonan Kepailitan dan PKPU Serta Asas Kelangsungan Usaha dalam Perspektif Hukum Kepailitan. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*. 6(2).

M., Tasbir, R., (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*. 5(2).

Martunas, S., (2023). Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*. 14(6).

Rizal, M. F., Adiwinarto, S., (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Karena Adanya Pandemi COVID-19. *Repository Unmuh Jember*.

Roni, P., (2022). Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana
Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur
Pidana. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4(5).

Viqi, A., (2023). Prinsip Pembuktian Secara Sederhana Sebagai Syarat Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. *Journal of Education Research*. 4(2).

Weruin, U., U., (2016). Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi
Hukum. *Jurnal Konstitusi*. 13(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Website

Diana Kusumasari, “*Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga*”,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga-lt4d47fcb095f46/>

Laurences Aulina, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)”,

<https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>

Maqdir Ismail and Partners, “Mahkamah Agung – Badan Legislatif Ke-Empat di Indonesia?”, <https://mip-law.com/mahkamah-agung-badan-legislatif-ke-empat-di-indonesia/>

Nurus Zaman, ”*Mengenal Peraturan Kebijakan dan Kedudukannya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-peraturan-kebijakan-dan-kedudukannya-lt65b0fb2e6e0f9/>

Vychung Chongson, ”*Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Kepailitan*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-asas-kelangsungan-usaha-going-concern-dalam-kepailitan-lt6729781f19a32/>

Info Hukum, ”Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya” <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>

Lain-Lain

Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 1349 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

HukumID Channel. (2024, Februari 5). SEMA No. 3 Tahun 2023 ini Bertentangan Dengan UU No. 37 Tahun 2004!!. [Video] YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=-zJ7Jtf4s7A&t=398s>

Tribunnews. (2024, April 4). [FULL] Eddy Hiarej di Sidang MK: Awalnya Ditolak, Tapi Serang Balik Kubu 01 & Bambang Widjijanto. [Video] YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=eCnlalqaQb8>